

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, 2021, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta; Litera.
- Ali, C. Badan Hukum. Alumni, 1999.
- Amin, F, dkk, Ilmu Perundang-undangan. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Faiqah Nur Azizah, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Tindak Pidana Korupsi," Adalah 6, No. 4 (2022), h. 31.
- Kamma, Hamzah, dkk. Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani). Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Kenedi, J. Buku Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penerbit Vanda Bengkulu, 2017.
- Khairandy, Ridwan. Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. FH UII Press, 2013.
- Muhammad Habibi, 2019, "Dinamika Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia,"
- Pudjosewojo, K. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Sinar Grafika, 2008.
- Prayudi dkk., Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023
- Rizkyana Zaffrindra Putri Dan Lita Tyesta Alw, "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara," Law Reform 11, No. 2 (2015), h. 5
- Rusli, Tami, dan Zulfi Diane Zaini. Sistem Badan Hukum Indonesia. Publikasi Universitas Bandar Lampung, 2019.
- Syarif, Mujaer Ibnu, dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syahrul Mubarak Dan Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, (2 Desember 2021)

Wildhan Indra Pramono Dan Adis Imam Munandar, "Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas," Jurnal Ilmiah Living Law 12, No. 1 (31 Januari 2020)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang